



# RENSTRA SKPD 2018-2023



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JLN. Dr.Cipto Mangunkusumo No. 10 Selong Telp. 90376) 21156



## KATA PENGANTAR

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019-2023 yang memberikan informasi kegiatannya kepada seluruh stakeholder dalam kurun waktu lima tahunan.

Melalui renstra Dinas Kelautan dan Perikanan ini dapat terlihat visi, misi, sasaran, kebijakan, program dan rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur selama 2019-2023. Dokumen renstra diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Lombok Timur dan seyogyanya dapat menggunakan Dokumen Renstra ini sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Mudah-mudahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur tahun 2019-2023 ini dapat memberikan informasi dan dapat dilaksanakan dengan baik. Masukan dan saran sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja lembaga ini dimasa yang akan datang, sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di : Selong

Pada Tanggal : 24 Desember 2021

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR



M. ZAKIYUDDIN, S.P., M.Si  
NIP. 197607012009011005  
Pembina (IV/a)

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD .....	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD .....	7
2.2. Sumberdaya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) .....	20
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	26
2.4. Sumber Daya Alam .....	30
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR . .....	34
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Fungsi Pelayanan OPD .....	34
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program RPJMD .....	35
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan ....	37
3.4. Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat .....	40
3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	41
3.6. Penentuan Isu-isu Strategis .....	44
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN .....	44
BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....	49
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan .....	49

BAB VI. RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN .....	50
6.1. Rencana Program dan Kegiatan .....	50
6.2. Kerangka Pendanaan .....	53
BAB VII.INDIKATOR KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN .....	63
BAB VIII.PENUTUP .....	64



## DAFTAR TABEL

Tabel	Hal.
1. Aset Tanah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Lombok Timur .....	22
2. Kendaraan Bermotor pada Dinas Kelautan dan Perikanan .....	23
3. Peralatan Laboratorium Dinas Kelautan dan Perikanan .....	23
4. Peralatan Audio Visual pada Dinas Kelautan dan Perikanan .....	24
5. Perlengkapan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan .....	24
6. Peralatan Komputer Dinas Kelautan dan Perikanan .....	25
7. Akuntabilitas Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Lombok Timur Tahun 2016-2020	26
8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Lombok Timur .....	27
9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kab.Lombok Timur .....	29
10. Potensi dan Produksi Perikanan Kab.Lombok Timur Tahun 2018 ....	31
11. Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Lombok Timur .....	34
12. Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Lombok Timur Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	38
13. Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Lombok Timur Berdasarkan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	40
14. Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	42
15. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat daerah Kab.Lombok Timur .....	44
16. Indikator Kinerja Perangkat daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2019-2020.....	45
17. Indikator Kinerja Perangkat daerah yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2023 .....	47
18. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kab.Lombok Timur 2019-2023 .....	49
19. Program dan Rencana Kegiatan tahun 2019-2020 .....	51
20. Program dan Rencana Kegiatan tahun 2021-2023 .....	52
21. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kab.Lombok Timur 2019-2020.....	54
22. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kab.Lombok Timur 2021-2023.....	57
23. Indikator Kinerja Dinas kelautan dan Perikanan Kab.Lombok Timur Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	63

## **BAB. I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kebijakan pembangunan secara umum diarahkan pada upaya pemerataan pembangunan keseluruhan wilayah, oleh karena itu pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu, selaras, sesuai dengan skala prioritas dan potensi daerah yang spesifik lokalita. Sejalan dengan arah dan kebijakan pembangunan nasional tersebut, pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan diarahkan pada upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan produktifitas, optimalisasi prasarana kelautan perikanan, pengawasan dan perlindungan sumberhayati kelautan perikanan dengan penataan ruang wilayah kelautan dan perikanan serta pemberdayaan masyarakat perikanan pada suatu daerah.

Kabupaten Lombok Timur mempunyai 21 kecamatan yang meliputi 254 desa mempunyai potensi yang cukup besar untuk penangkapan dan budidaya ikan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka Kabupaten Lombok Timur mempunyai hak untuk menentukan arah pengembangan dan kebijakan program-program pembangunan sektor kelautan perikanan secara bertahap dan berkelanjutan.

Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Lombok Timur berorientasi pada pembangunan Kelautan dan Perikanan secara nasional dan dirumuskan dengan kondisi wilayah serta tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten, dimana setiap program yang dirumuskan harus sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selaras dengan kemajuan jaman demi terciptanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Kebijakan pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan pada dasarnya merupakan suatu rangkaian yang sistematis yang disusun berdasarkan program-program pembangunan yang relevan dan spesifik wilayah.

Secara yuridis formal dijabarkan kedalam perencanaan pembangunan lima tahunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi acuan dalam perencanaan program pembangunan Kabupaten Lombok Timur. Program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam Perencanaan Strategis (Renstra) Bidang Kelautan Perikanan Kabupaten Lombok Timur.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 – 2023 disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indicator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program/kegiatan.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 – 2023 memuat visi, misi, serta tugas pokok dan fungsi instansi, lingkungan strategis, dan faktor-faktor penentu keberhasilan, serta tujuan, sasaran, dan cara mencapainya, diharapkan dapat memberikan pedoman, arah, dan tujuan yang jelas untuk masa lima tahun mendatang. Renstra ini disusun berdasarkan program dan kegiatan yang terencana, terukur, dan diharapkan dapat memenuhi kehendak, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat (*stakeholders*).

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur ini secara umum memiliki tujuan memberikan arah, pedoman yang terencana dalam mengarahkan seluruh potensi sumberdaya manusia dan potensi lain yang dimiliki dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Strategi yang mampu menjawab kemajuan, perkembangan dan tantangan jaman. Sedangkan secara khusus dirumuskan untuk memberikan gambaran potensi riil yang dimiliki, melalui factor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan menetapkan program dan sasaran kerja yang terarah, terukur yang akan dijadikan pedoman pada masa lima tahun mendatang; memprediksi hambatan-hambatan yang terjadi dan sekaligus mencari jalan keluar (solusi); serta memberikan arah dalam upaya menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pihak.

## **1.2. Landasan Hukum**

Sebagai dokumen perencanaan formal suatu instansi pemerintah, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur periode 2018 – 2023 mengacu pada :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009;
4. Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



8. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dalam Pembangunan Daerah;
12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Permendagri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 Tentang tahapan tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Timur 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Timur.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penetapan Perencanaan Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 – 2023 dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan selama periode tahun 2018–2023, serta bertujuan sebagai instrumen dalam mengukur akuntabilitas kinerja Bidang Kelautan Perikanan selama periode tahun 2018 – 2023.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dokumen Perencanaan Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018– 2023 sebagai berikut:

#### ***Bab I. Pendahuluan***

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

## ***Bab II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah***

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD
- 2.2. Sumber Daya OPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

## ***Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur***

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program RPJMD
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Analisis dan Penentuan Isu-Isu Strategis

## ***Bab IV. Tujuan dan Sasaran***

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

## ***Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan***

- 5.1. Strategi yang di Gunakan
- 5.2. Kebijakan Teknis

## ***Bab VI. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan***

## ***Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan***

## ***Bab VII. Penutup***

## ***Lampiran***



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Timur**

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur di bentuk dan mempunyai Tugas dan Fungsi di dasarkan atas Peraturan Bupati Lombok Timur No. 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Timur, yang selanjutnya dilakukan penyesuaian dan penataan untuk melakukan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indoneisa No. 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Unit Kerja pada Perangkat Daerah pada Kabupaten Kota yang melakukan urusan pemerintah di bidang Kelautan dan Perikanan.

Selanjutnya pada tanggal 1 April 2021 ada penyesuaian dan penataan kembali Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan. Pada pasal 2 dinyatakan Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangannya kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan.
2. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan mengenai tugas dan fungsinya diatur pada BAB III pasal 4 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 tahun 2021 tersebut yaitu :

1. Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pengelolaan Perikanan Budidaya, Pemberdayaan Usaha Perikanan, dan Pengelolaan UPT;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pengelolaan Perikanan Budidaya, Pemberdayaan Usaha Perikanan, dan Pengelolaan UPT;
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pengelolaan Perikanan Budidaya, Pemberdayaan Usaha Perikanan dan Pengelolaan UPT;
  - d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
  - e. Pelaksanaan kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi dinas kelautan dan perikanan Kab. Lombok Timur diatas pada BAB II pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 dengan susunan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris Dinas; terdiri atas :
  1. Subbagian Keuangan dan Pelaporan; dan
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, terdiri atas :
  1. Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan;
  2. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil; dan
  3. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Nelayan Kecil.
- d. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, terdiri atas :
  1. Seksi Perizinan Perikanan;
  2. Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan; dan
  3. Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dan Pengawasan.

- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan, terdiri atas :
    - 1. Seksi Bina Mutu, Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan;
    - 2. Seksi Akses Pasar, Promosi dan Kemitraan Usaha; dan
    - 3. Seksi Pendayagunaan Teknologi dan Logistik Usaha Perikanan.
  - f. UPT; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
1. Sekretariat
- 1. Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi kesekretariatan, mengordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan.
  - 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi :
    - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas;
    - b. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
    - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas;
    - d. Pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas; dan
    - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

- a. Subbagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan administrasi keuangan, monitoring dan evaluasi.  
Dalam melaksanakan tugas Subbagian Keuangan dan Pelaporan, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - Penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Dinas;



- Menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- Penatausahaan keuangan dan pengelolaan penyusunan anggaran Dinas;
- Menyiapkan data pendukung laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan tahunan;
- Penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
- Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta menyusun laporan hasil pelaksanaannya; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, arsip dan dokumentasi, rumah tangga dan perlengkapan, serta urusan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
- Pelaksanaan hubungan masyarakat;
- Pelaksanaan dan administrasi kepegawaian dan sistem informasi;
- Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi dan analisis hukum, serta urusan dokumentasi dan informasi hukum;
- Pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Dinas;

## 2. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap

a. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan, pemberdayaan nelayan kecil dan pembinaan kelembagaan dan sistem informasi nelayan kecil.

b. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan pengelolaan perikanan tangkap;
- Penyusunan rencana strategis peningkatan hasil dan mutu, sarana dan prasarana pengelolaan perikanan tangkap;
- Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah;
- Perumusan kebijakan pembinaan kelembagaan dan sistem informasi nelayan kecil;
- Perumusan kebijakan pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikanan bidang perikanan tangkap dalam Daerah;
- Pengoordinasian pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikanan bidang perikanan tangkap dalam daerah;
- Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan perikanan tangkap dalam Daerah; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap membawahi :

a. Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan penangkapan ikan pada sumberdaya alam yang dapat diusahakan dalam Daerah;

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Daerah;
- Penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan dalam Daerah;
- Penyediaan prasaran usaha perikanan tangkap;

- Pengoordinasian pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Daerah;
  - Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap; dan
  - Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- b. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah;
- Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil menyelenggarakan fungsi :
- Penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil;;
  - Pengembangan kapasitas nelayan kecil;
  - Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil;
  - Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha kepada nelayan kecil; dan
  - Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- c. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Nelayan Kecil mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan sistem Informasi Nelayan Kecil;
- Dalam melaksanakan tugas Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Nelayan Kecil menyelenggarakan fungsi :
- Penyusunan data, identifikasi dan analisis pembinaan kelembagaan dan sistem informasi nelayan kecil;
  - Persiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan kelembagaan dan sistem informasi nelayan kecil;



- Melaksanakan kebijakan pembinaan kelembagaan dan sistem informasi nelayan kecil;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan kelembagaan dan sistem informasi nelayan kecil; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### 3. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya

- a. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan perizinan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya berada dalam Daerah.
- b. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - Pengoordinasian pelaksanaan verifikasi izin usaha perikanan dan pembudidayaan ikan kecil yang berada di dalam Daerah;
  - Perumusan kebijakan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya berada dalam Daerah ;
  - Perumusan kebijakan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil;
  - Perumusan kebijakan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) yang berada dalam Daerah;
  - Perumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan;
  - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan perikanan budidaya; dan;
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya membawahi :

- a. Seksi Perizinan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) yang usahanya berada di dalam Daerah;

Dalam melaksanakan tugas Seksi Perizinan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan rekomendasi Izin Usaha Perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi, dan/atau manfaat atau dampak negatifnya berada di dalam daerah yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;
  - Pelayanan penerbitan rekomendasi Izin Usaha Perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi, dan/atau manfaat atau dampak negatifnya berada di dalam Daerah yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;
  - Penyusunan dan pelaksanaan penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) yang berada dalam Daerah;
  - Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) yang berada dalam Daerah; dan
  - Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- b. Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan Pembudidayaan ikan kecil;

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil;
- Pengembangan kapasitas nelayan kecil;
- Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidayaan ikan kecil;
- Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, dan kemitraan usaha bagi pembudidaya ikan kecil;

- Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pembudidaya ikan kecil; dan
  - Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- c. Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan dan pengawasannya; Dalam melaksanakan tugas Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :
- Pelaksanaan penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan yang berada dalam Daerah;
  - Pelaksanaan penyediaan prasarana pembudidayaan ikan yang berada dalam Daerah;
  - Pelaksanaan penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan yang berada dalam Daerah;
  - Pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya yang berada dalam Daerah;
  - Pelaksanaan pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat;
  - Penyusunan bahan perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat;
  - Pelaksanaan pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Daerah;
  - Penyusunan bahan perencanaan dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat; dan
  - Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.



#### 4. Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan

- a. Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha perikanan.
- b. Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - Penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan;
  - Penyusunan kebijakan penentu di Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan ;
  - Pengoordinasian tugas dan kegiatan di lingkup Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan;
  - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan; dan
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan membawahi :

- a. Seksi Bina Mutu, Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, koordinasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan bina mutu pengembangan produk kelautan dan perikanan;

Dalam melaksanakan tugas Seksi Bina Mutu, Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Bina Mutu, Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan;
- Penyiapan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis Bina Mutu, Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan;
- Penyiapan bahan pengadaan, pembinaan dan pendampingan pemanfaatan sarana dan prasarana pengembangan produk kelautan dan perikanan;

- Penyiapan bahan pembinaan mutu, pengembangan dan pemberdayaan pelaku usaha produk kelautan dan perikanan;
  - Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan sentra produk hasil kelautan dan perikanan serta unit pengelolaan hasil kelautan dan perikanan;
  - Penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan mutu kepada petugas/pelaku usaha produk kelautan dan perikanan; dan
  - Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- b. Seksi Akses Pasar, Promosi dan Kemitraan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, koordinasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan di bidang akses pasar, promosi dan kemitraan usaha perikanan;

Dalam melaksanakan tugas Seksi Akses Pasar, Promosi dan Kemitraan Usaha menyelenggarakan fungsi :

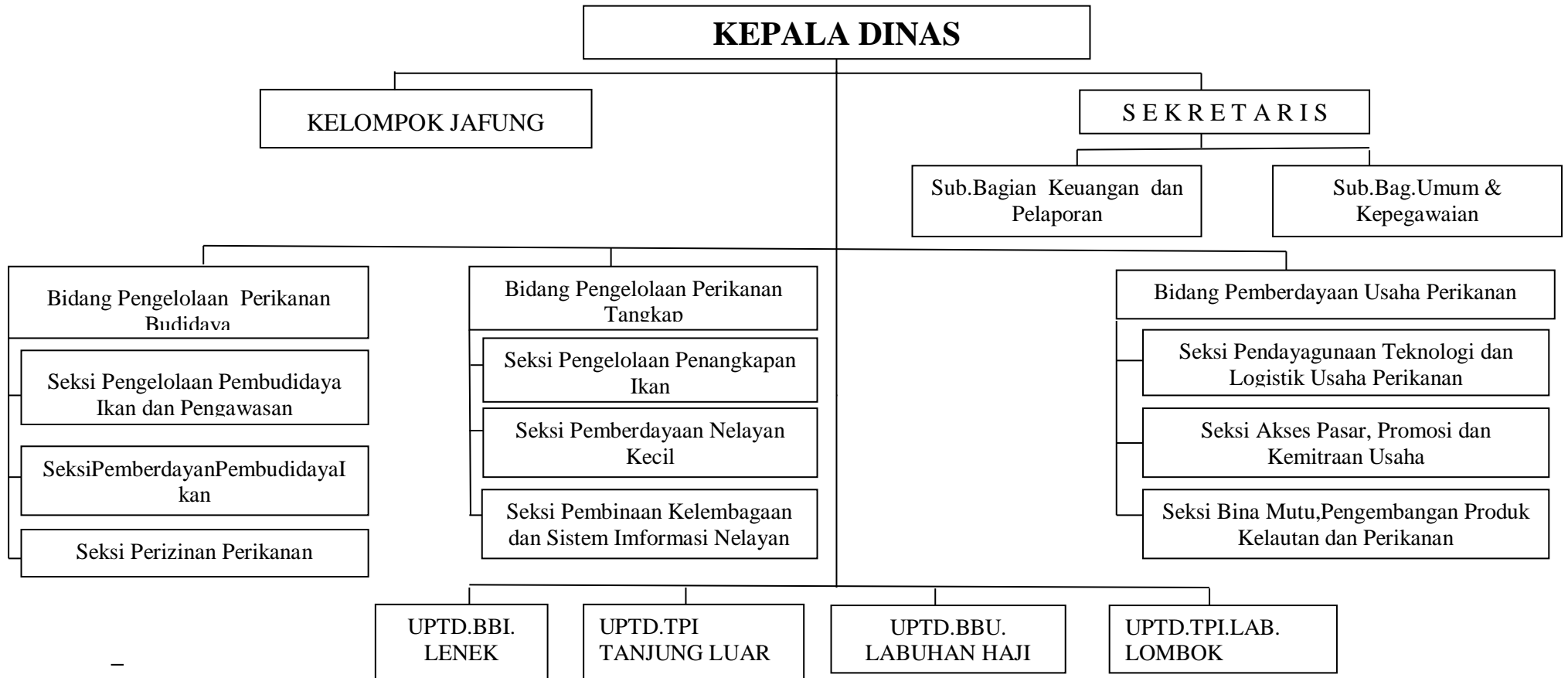
- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan strategi pengendalian dan pembinaan kegiatan akses pasar, promosi dan kemitraan usaha perikanan;
- Penyiapan bahan dan melaksanakan verifikasi suplier hasil perikanan;
- Penyiapan bahan dan memverifikasi sarana dan prasarana pemasaran;
- Penyiapan bahan data potensi kebutuhan dan konsumsi ikan;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan promosi produk kelautan dan perikanan serta gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) untuk mendapatkan akses pasar dan meningkatkan konsumsi ikan;
- Penyiapan bahan usulan Rencana Strategis, kegiatan Akses Pasar, Promosi dan Kemitraan Usaha;
- Penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

c. Seksi Pendayagunaan Teknologi dan Logistik Usaha Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, koordinasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan di bidang pendayagunaan teknologi, logistik usaha perikanan;

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pendayagunaan Teknologi dan Logistik Usaha Perikanan menyelenggarakan fungsi :

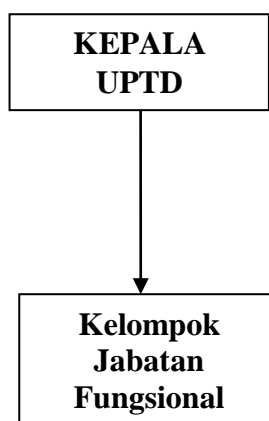
- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan strategi pengendalian dan pembinaan kegiatan pendayagunaan teknologi dan logistik usaha perikanan;
- Penyiapan bahan bimbingan teknis penerapan teknologi dan logistik usaha perikanan;
- Pengkajian dan penerapan teknologi dan logistik usaha perikanan;
- Penyiapan sarana logistik usaha perikanan;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaporan pendayagunaan teknologi dan logistik usaha perikanan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, maka Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur Seperti pada Gambar 2.1 dibawah ini.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur

Sedangkan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas mengacu pada Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, yaitu :



**Gambar 2.2 Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur**

## **2.2. Sumberdaya Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**

Sumberdaya yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur terdiri dari penyediaan sumberdaya manusia berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti baik pendidikan formal maupun non formal, dan penyediaan sarana prasana yang mendukung penyelenggaraan kegiatan perencanaan seperti gedung beserta ruang rapat yang memadai, fasilitas komputer beserta jaringan internet, meja kursi, peralatan kantor dan lain-lain.

### **1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya aparatur yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi .

- a) Jumlah keseluruhan pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Timur (Th. 2018) sebanyak 72 orang, terdiri dari Pegawai



Negeri Sipil (PNS) 37 orang, Pegawai Non PNS 35 orang dengan rincian sebagai berikut :

Dilihat dari jenis kelamin jumlah PNS dan Non PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Lombok Timur terdiri dari :

- Laki-laki : 48 orang
- Perempuan : 24 orang

b) Berdasarkan Tingkat Pendidikan. PNS dan Non PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Lombok Timur terdiri dari :

- S2 : 2 orang
- S1 : 50 orang
- SMA : 16 orang
- SMP : 2 orang
- SD : 2 orang

c) Sedangkan dilihat dari Jabatan/Eselon, PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Timur terdiri dari :

- Eselon II : 1 orang
- Eselon III : 4 orang
- Eselon IV : 13 orang

d) Aset Dinas Kelautan dan Perikanan

1. Aset yang dikelola

Fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki dan dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak (tetap). Beberapa aset yang mendukung tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

a. Pengelolaan Perikanan Tangkap

Aset yang mendukung perikanan tangkap adalah : TPI Tanjung Luar dan TPI Lab.Lombok.

b. Pengelolaan Perikanan Budidaya

Aset yang mendukung perikanan budidaya adalah : BBI Lokal Lenek dan BBIP Lab.Haji.

## 2. Tanah

Aset tanah Dinas Kelautan dan Perikanan per 31 Desember 2018 terdiri dari 15 tempat (lokasi) yang diperuntukkan untuk bangunan kantor pemerintah, pos jaga dan diperuntukkan sebagai tempat tambak dan kolam. Aset tanah Dinas Kelautan dan Perikanan secara rinci seperti table 3 di bawah ini.

Tabel 1. Aset Tanah Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2018

No.	JenisBarang	Luas (m2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat
1	2	3	4	5
1.	Kolam Air Tawar	600	1983	Lenek Kec.Aikmel
2.	Tambak	20.000	1980	Pijot Kec.Keruak
3.	Tanah TPI Tanjung Luar	200	1979	Tanjung Luar
4.	Tanah TPI Lab.Haji	400	1973	Lab.Haji
5.	Tanah Pos Perikanan Lab. Haji	1.000	1974	Lab.Haji
6.	Tanah BBI Sembalun	4.800	1988	Sembalun
7.	Tanah Pos Perikanan Perian	600	1982	Perian
8.	Tanah PosPerikananMasbagik	900	1990	Masbagik
9.	Tanah Pos Perikanan Batunampar	100	1981	Batunampar
10.	Tanah BBI LokalLenek	122.290	1990	Lenek Kec.Aikmel
11.	Tanah TPI Lab. Lombok	1.200	1974	Lab.Lombok
12.	Tanah Pos Perikanan Lab. Pandan	700	1992	Lab.Pandan
13.	Tanah Bangunan Kantor	15.000	2002	Selong
14.	Tanah Bangunan Kantor	800	1979	Lab.Haji
15.	Tanah Bangunan Kantor	150	1974	Serewe

### 3. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari kendaraan bermotor, Peralatan Laboratorium, Peralatan Audio Visual, Perlengkapan Kantor, dan Peralatan Komputer (berturut-turut tabel 5 – 9).

Tabel 2. Kendaraan Bermotor Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Nama Barang	Satuan	Kondisi			Jumlah
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Kendaraan Roda 4	Unit	6	-	-	6
2	Kendaraan Roda 2	Unit	44	-	-	44
3	Kapal Motor	Unit	-	-	2	2
4	Alat Angkut Apung Motor Brg Lain-lain	Unit	-	-	2	2
5	Speed Boat	Unit	2	-	-	2
6	Motor Boat	Unit	3	-	-	3

Tabel 3. Peralatan Laboratorium Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Nama Barang	Satuan	Kondisi			Jumlah
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Global Positioning System (GPS)	Paket	1	-	-	1
2	Corong	Buah	-	-	1	1
3	Centrifuge Electric	Buah	-	-	1	1
4	Pipet	Buah	-	-	1	1
5	Cawan Porselin	Buah	1	-	-	1
6	Alat Laboratorium Lainnya	Unit	-	-	25	25
7	Gelas Ukur	Buah	1	-	-	1
8	Mikroskop	Buah	1	-	-	1
9	Barometer	Buah	3	-	-	3

Tabel .4. Peralatan Audio Visual Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Nama Barang	Satuan	Kondisi			Jumlah
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Televisi	Unit	1	-	1	1
2	Equalizer	Unit	-	-	1	1
3	Wireless	Unit	1	-	-	1
4	Handy Cam	Unit	-	-	1	1
5	Camera + Attachment	Unit	2	-	-	2
6	Peralatan studio Visual Lain-lain	Unit	1	-	-	1
7	Camera Vertikal	Unit	-	-	4	4
8	Pesawat Telephone	Unit	1	-	-	1
9	Facsimile	Unit	1	-	-	1

Tabel 5. Perlengkapan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Nama Barang	Satuan	Kondisi			Jml.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
1	Timbangan	Buah	2	-	-	2
2	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	Buah	4	-	2	6
3	Mesin Hitung Elektronik	Buah	-	-	1	1
4	Mesin Calculator	Buah	-	-	8	8
5	Mesin Hitung/Jumlah Lain-lain	Buah	-	-	1	1
6	Lemari Besi	Buah	1	-	-	1
7	Rak Kayu	Buah	-	-	2	2
8	Filling Besi/Metal	Buah	7	-	-	7
9	Brankas	Buah	2	-	-	2
10	Lemari Kaca	Buah	3	-	-	3
11	Lemari kayu	Buah	6	-	2	8
12	Papan Visual	Unit	-	-	2	2
13	White Board	Buah	-	5	-	5
14	Peta	Buah	1	-	-	1
15	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	Unit	-	-	-	9
16	Genset	Unit	1	-	-	1
17	Mesin Pompa Air	Unit	1	-	-	1
18	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	Buah	1	-	-	1
19	Lemari Pakaian	Buah	1	-	-	1
20	Meja Rapat	Unit	1	-	-	1
21	Meja Komputer	Unit	-	-	2	2

22	Meja Kayu/Rotan	Buah	-	-	8	8
23	Meja 1/2 Biro	Buah	8	-	19	27
24	Meja Kerja	Buah	1	-	-	1
25	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	Buah	-	-	8	8
26	Kursi Rapat	Paket	1	-	-	1
27	Kursi Tamu	Buah	4	-	-	4
28	Kursi Putar	Buah	-	1	-	1
29	Kursi Biasa	Buah	13	-	-	13
30	Kursi Lipat	Paket	1	-	-	1
31	Kursi Kerja	Buah	6	-	-	6
32	Sofa	Unit	2	-	-	2
33	Jam Mekanis	Buah	-	-	9	9
34	AC Split	Unit	1	-	-	1
35	Kipas Angin	Buah	-	-	4	4
36	Kompore Gas	Unit	1	-	-	1
37	Tabung Gas	Unit	1	-	-	1
38	Alat Dapur Lain-lain	Unit	8	-	-	8
39	Dispenser	Unit	2	-	1	3
40	Aquarium	Unit	1	-	2	2
41	Tangga Alumunium	Buah	1	-	-	1
42	Alat RumahTangga Lain-lain	Unit	26	-	-	26
43	Mesin Pendingin Ruangan	Buah	1	-	-	1

Tabel .6. Peralatan Komputer Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Nama Barang	Satuan	Kondisi			Jumlah
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
1	P.C Unit / Komputer PC	Unit	2	-	11	13
2	Lap Top / Notebook	Unit	13	1	1	14
3	Personal Komputer Lain-lain	Buah	-	-	15	15
4	CPU	Unit	-	-	2	2
5	Hard Disk	Buah	-	-	3	3
6	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	Unit	-	-	3	3
7	Printer	Unit	8	-	11	17
8	Flash disk	Buah	-	-	2	2
9	UPS	Buah	-	-	4	4
10	Modem	Unit	-	-	1	1

## 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

### 2.3.1. Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 7. Akuntabilitas Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

Lombok Timur Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Indikator Kinerja	Target	Capaian Tahun				
		Realisasi	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6		7
1.	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Target	15.858,30	15.908,30	15.958,30	16.250,00	16.300,00
		Realisasi	14.315,72	16.200,56	16.200,00	19.633,80	19.666,09
		%	90,27	101,83	101,51	120,82	120,65
2.	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Target	18.799,58	19.299,58	19.799,58	43.792,00	44.292,00
		Realisasi	144.843,64	108.556,15	106.006,30	35.891,50	40.377,80
		%	770,46	562,47	535,39	81,95	91,16



Tabel T-C.23

Tabel 8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran yang baik	368.148.816	395.820.055	328.816.100	498.875.000	518.806.562	333.095.119	384.924.606	318.379.688	479.037.182	469.203.797
2.	Tertatanya sarana dan prasarana aparatur	66.600.403	61.030.636	166.726.781	332.035.974	364.713.374	61.701.550	60.860.220	166.719.897	330.951.404	174.756.248
3.	Tersusunnya dokumen perencanaan, laporan keuangan yang tepat waktu	20.600.000	134.984.250	103.338.700	287.344.500	267.181.250	20.552.000	124.409.100	101.198.200	276.820.500	259.952.700
4.	Tersusunnya dokumen aset dinas	9.401.500	26.543.700	29.544.000	42.744.000	12.851.500	9.401.500	26.513.000	23.544.000	42.544.000	12.850.900
5.	Terbinanya kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS)	92.635.800	111.750.614	-	-	-	80.470.882	111.472.500	-	-	-
6.	Tercapainya target konsumsi ikan masyarakat	231.500.000	261.925.000	311.449.805	303.926.600	80.559.200	231.235.000	261.925.000	308.478.000	303.807.600	67.884.200
7.	Peningkatan sarana dan prasarana pembudidaya ikan	477.229.436	796.088.600	490.843.469	-	267.403.650	475.589.680	784.003.952	487.252.625	-	267.281.350
8.	Tercapainya target produksi perikanan tangkap	1.089.442.000	1.526.734.200	1.842.648.200	2.634.824.200	1.943.100.000	1.086.869.000	1.522.006.750	1.836.442.800	2.627.156.300	1.885.308.836

9.	Peningkatan kapasitas SDM masyarakat pesisir	77.515.736	-	22.326.000	131.130.000	37.008.655	74.375.750	-	17.826.000	125.205.000	37.008.655
10.	Tercapainya target produksi perikanan budidaya	1.214.600.000	841.735.455	678.462.000	1.248.456.681	1.313.746.150	1.208.409.825	834.906.604	678.304.000	1.242.313.900	1.309.613.435
11.	Peningkatan sarana dan prsarana perikanan tangkap	200.000.000	-	-	-	-	199.626.000	-	-	-	-
12.	Peningkatan kapasitas SDM pembudidaya ikan	-	-	30.138.000	270.993.000	-	-	-	30.138.000	270.910.000	-
13.	Peningkatan kapasitas SDM nelayan	-	-	30.138.000	20.014.000	25.109.350	-	-	30.138.000	20.014.000	25.109.350
	JUMLAH .....	3.847.673.691	4.156.612.510	4.034.431.055	5.770.343.955	4.830.479.691	3.781.326.306	4.111.021.732	3.998.421.210	5.718.759.886	4.508.969.471

Selong, Desember 2021

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

M. ZAINUDDIN,S.Pi.M.Si  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19760701 200901 1 005

Tabel T-C 24

Tabel 9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur

NO	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-ATA PERTUMBUHAN	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGA RAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	7.385.958.613	7.260.732.811	6.928.890.787	8.285.498.220	7.045.893.877	7.251.537.055	7.011.782.115	6.778.069.164	8.127.216.975	6.658.698.094	98,18	96,57	97,82	98,09	94,50	- 0,41	- 1,20

## 2.4 Sumber daya Alam

Wilayah laut Kabupaten Lombok Timur dengan luas sekitar 1.074,33 Km<sup>2</sup> dan garis pantai sepanjang 220 Km memiliki potensi sumberdaya yang cukup besar, terutama sumberdaya perikanan laut, baik kuantitas maupun diversitasnya. Potensi lestari sumberdaya perikanan laut Kabupaten Lombok Timur diperkirakan sebesar 18.242 ton/tahun, terdiri dari ikan pelagis sebesar 7.752,8 ton/tahun dan ikan demersal sebesar 10.489,2 ton/tahun. Dalam rangka meningkatkan pendapatan nelayan dan keluarganya, fokus pengembangan adalah melalui optimalisasi dan modernisasi armada dan alat penangkapan ikan.

Disamping potensi di bidang penangkapan ikan laut, terdapat juga potensi pengembangan dibidang lainnya seperti :

- BudidayaLaut, terdiri dari budidaya ikan (kerapu, kakap), udang/lobster, budidaya molluska (kerang-kerangan, mutiara, teripang) dan budidaya rumput laut. Potensi lahan untuk pengembangan budidaya laut sekitar 6.842,23 Ha dan sudah dimanfaatkan sekitar 2.056,95 Ha (30,06 %).
- Budidaya Air Payau (Tambak) dengan potensi lahan untuk pengembangan sekitar 3.500 Ha dan sudah dimanfaatkan sekitar 269,50 (7,7 %).
- Budidaya Air Tawar, terdiri dari perairan umum (danau, waduk, sungai), kolam air tawar dan mina padi dengan potensi lahan untuk pengembangan sekitar 4.918,20 Ha dan sudah dimanfaatkan sekitar 1.171,90 Ha (23,83%).

Pada beberapa tahun terakhir ini industri pengolahan perikanan di Kabupaten Lombok Timur mulai berkembang dengan jumlah pengolah sebanyak 4.766 orang. Untuk meningkatkan kemampuan para pengolah, maka direncanakan untuk memberikan bimbingan teknis dan bantuan sarana dan prasarana pengolahan serta penguatan kelembagaan pengolah.

**Tabel 10. Potensi dan produksi perikanan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018**

No	Kriteria Teknis	Volume	Satuan
1	2	3	4
1.	Jumlah kawasan minapolitan/sentra produksi		
	a. Jumlah kawasan minapolitan	3	Kawasan
	b. Jumlah kawasan sentra produksi perikanan	3	Kawasan
2.	Produksi perikanan		
	a. Produksi Perikanan Tangkap	12.738,50	Ton
	b. Produksi Perikanan Budidaya	111.940,74	Ton
	c. Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan	3.187,70	Ton
3.	Produksi benih ikan dan udang		
	a. Produksi benih ikan	3.000.000	Ekor
	b. Produksi benih udang	-	Ekor
4.	Jumlah balai benih		
	a. Jumlah balai benih ikan (BBI) lokal	1	Unit
	b. Jumlah balai benih udang (BBU/BBUG) lokal	1	Unit
	c. Jumlah unit pembenihan rakyat (UPR)	73	Unit
	d. Jumlah unit hatchery skala rumah tangga (HSRT)	-	Unit
5.	Luas pengelolaan lahan budidaya		
	a. Luas pengelolaan lahan budidaya air tawar	1.171,90	Ha
	b. Luas pengelolaan lahan budidaya air payau	269,50	Ha
	c. Luas pengelolaan lahan budidaya laut	2.056,95	Ha
6.	Luas potensi lahan budidaya		
	a. Luas potensi lahan budidaya air tawar	4.918,20	Ha
	b. Luas potensi lahan budidaya air payau	3.500,00	Ha
	c. Luas potensi lahan budidaya laut	6.842,23	Ha
7.	Luas perairan umum daratan (PUD) untuk perikanan tangkap	-	Ha
8.	Jumlah pangkalan pendaratan ikan (PPI)		
	a. Jumlah pangkalan pendaratan ikan (PPI) yang sudah operasional	2	Unit
	b. Jumlah pangkalan pendaratan ikan (PPI) yang belum operasional	-	Unit
9.	Jumlah kapal perikanan		
	a. Jumlah perahu tanpa motor	461	Unit
	b. Jumlah kapal/perahu motor tempel	3.123	Unit
10.	Jumlah tenaga kerja perikanan		
	a. Jumlah nelayan	16.434	Orang
	b. Jumlah pembudidaya ikan	5.995	Orang
	c. Jumlah pengolah ikan	4.766	Orang
	d. Jumlah pemasar produk perikanan	2.403	Orang

No	Kriteria Teknis	Volume	Satuan
1	2	3	4
11.	Jumlah unit pengolahan ikan (UPI)	2	Unit
12.	Jumlah unit pemasaran ikan (seperti: pasar ikan higienis (PIH), Los pasar ikan, dan pasar ikan tradisional)	19	Unit
13.	Jumlah kelompok masyarakat pengawas sumberdaya kelautan dan perikanan	7	Kelompok
14.	Jumlah prasarana pos pengawasan SDKP	7	unit
15.	Jumlah kasus pelanggaran bidang SDKP	10	Kasus
16.	Jumlah pulau-pulau kecil yang dikelola	11	Pulau
17.	Luas kawasan konservasi perairan dikelola		
	a. Luas kawasan konservasi perairan umum (termasuk lubuk larangan)	-	Ha
	b. Luas kawasan konservasi perairan laut (termasuk KKLD)	1.364	Ha
18.	Jumlah tenaga penyuluh		
	a. Jumlah tenaga penyuluh perikanan PNS	19	Orang
	b. Jumlah tenaga penyuluh pertanian PNS yang menangani perikanan	3	Orang
	c. Jumlah tenaga penyuluh perikanan (kontrak)	3	Orang
19.	Jumlah tenaga statistik tenaga perikanan PNS	3	Orang

## 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Keberhasilan pembangunan mencapai sasaran prioritas atau target kinerja dipengaruhi oleh multifaktor. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor-faktor yang termasuk kategori Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD, adapun tantangan dan peluang tersebut sebagai berikut :

### A. Tantangan

1. Peningkatan jumlah penduduk berakibat meningkatnya permintaan akan bahan makanan termasuk komoditi perikanan.
2. Peningkatan taraf hidup akan meningkatkan permintaan produk berkualitas.



3. Pengembangan usaha perikanan yang berwawasan ramah lingkungan.
4. Pelanggaran jalur penangkapan serta penggunaan alat dan bahan terlarang dalam kegiatan penangkapan ikan.
5. Lemahnya permodalan nelayan dan pembudidaya.
6. Sarana dan prasarana terbatas mengakibatkan produksi / produktifitas rendah.
7. Rendahnya sumber daya manusia masyarakat pesisir.
8. Terbatasnya pemanfaatan teknologi perikanan tangkap.

- **Peluang**

1. Adanya lahan tambak marginal yang dapat digunakan untuk budidaya udang dan produksi garam.
2. Potensi kelautan dan perikanan cukup besar dan berpeluang untuk di kembangkan.
3. Permintaan pasar akan hasil perikanan meningkat.
4. Meningkatnya animo masyarakat berusaha dibidang kelautan dan perikanan.
5. Adanya tawaran diklat baik dari pemerintah ataupun swasta.
6. Kandungan gizi komoditi perikanan sangat diperlukan bagi kesehatan.

### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Beberapa isu strategis dan permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 11. Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Unit Eselon III	Masalah	
Sekretariat	1.	Rendahnya etos kerja aparatur dilapangan.
	2.	Terbatasnya SDM baik dalam hal kualitas maupun kuantitas.
Pengelolaan Perikanan Tangkap	3.	Masih terjadinya illegal fishing, serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan.
	4.	Masih kurangnya sarana dan prasarana penangkapan ikan.
	5.	Terjadinya penurunan sumber daya ikan di wilayah penangkapan perikanan dan perairan umum daratan
	6.	Semakin jauhnya daerah penangkapan ikan
Pengelolaan Perikanan Budidaya	7.	Masih terbatasnya sarana produksi budidaya perikanan
	8.	Terbatasnya penggunaan teknologi budidaya
	9.	Tingginya harga pakan tidak sebanding dengan harga jual ikan
	10.	Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan budidaya
	11.	Masih terbatasnya ketersediaan benih bermutu dan induk unggul
Unit Eselon III	Masalah	Unit Eselon III
Pengelolaan Usaha Perikanan	12.	Masih rendahnya kualitas produk olahan perikanan dan packing dari segi promosi
	13.	Skala usaha yang masih skala rumah tangga dan belum dikelola secara maksimal
	14.	Masih rendahnya konsumsi ikan masyarakat

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program RPJMD

Pembangunan Lombok Timur pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 tentunya akan menuntut perhatian lebih, karena tidak hanya untuk melanjutkan hal-hal yang belum terselesaikan, juga dalam rangka melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2005 - 2025, dan tentunya juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul dimasa yang akan datang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 ini, selain menyelesaikan isu yang bersifat lokal, juga mempertimbangkan isu-isu yang bersifat nasional dan global, seperti pertumbuhan dan pemerataan, kemiskinan, pengangguran, lingkungan hidup dan penataan ruang. Dengan mempertimbangkan Visi, Misi, sasaran pokok dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan, isu strategis, peluang dan tantangan pembangunan, sertavisi, misi dan arah pembangunan jangka jangka menengah nasional, maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2018-2023 sebagai mana diuraikan berikut :

#### a. Visi

Visi dan misi pembangunan yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 adalah :

“ Lombok Timur yang Adil, Sejahtera dan Aman”

**Lombok Timur Adil** : bermakna perlakuan terhadap masyarakat di Kabupaten Lombok Timur tidak berat sebelah kepada satu golongan tertentu, karena semuanya tergantung pada aspek kebenaran, kebaikan dan kepatutan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan.

**Lombok Timur Sejahtera** : bermakna pembangunan di Kabupaten Lombok Timur memperhatikan kualitas sumber daya manusia dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang termarginalkan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

**Lombok Timur Aman** : bermakna bahwa pembangunan dengan memberikan rasa aman kepada masyarakat terutama kaum perempuan, anak difabel dan masyarakat miskin.

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Lombok Timur yang Adil, Sejahtera dan Aman, ditetapkan 6 (Enam) misi pembangunan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

- Misi 1 Membangun dan meningkatkan infrastruktur wilayah secara berimbang pada bidang transportasi, energi, irigasi, air bersih serta perumahan.
- Misi 2 Meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berdayasaing dengan biaya terjangkau.
- Misi 3 Menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi local melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya.
- Misi 4 Memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan social, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olah raga.
- Misi 5 Menciptakan keamanan dan ketertiban yang harmonis dalam masyarakat dengan meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan yang lebih baik dan religious.
- Misi 6 Meningkatkan reformasi birokrasi melalui pemekaran wilayah pemerintahan desa, kecamatan dan kabupaten untuk menuju aparatur yang bersih dan berorientasi kepada pelayanan publik.

Dengan mengacu pada tahapan-tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur (2018-2023) telah ditetapkan visi dan misi pembangunan daerah yang merupakan harapan masa depan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera

Tujuan, sasaran dan kebijakan umum RPJMD 2018-2023 dijabarkan dalam 6 (Enam) misi. Misi RPJMD 2018-2023 yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan terdapat pada misi 3, yaitu :

Misi 3 Menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya.

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan**

#### **a. Visi**

Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi Kementerian Kelautan dan Perikanan ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritime dunia.

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah :

**“Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional“.**

#### **b. Misi**

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yakni :

1. Kedaulatan (Sovereignty), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mesengamankan sumber daya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.
2. Keberlanjutan (Sustainability), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. Kesejahteraan (Prosperity), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

c. Sasaran

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan berdasarkan tujuan yang akan dicapai :

1. Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara Terintegrasi
2. Mengelola Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
3. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing berbasis Pengetahuan
4. Memperluas Akses Pasar Domestik dan Internasional

Tabel 12. Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara Terintegrasi	1 Belum Maksimalnya koordinasi antara Pusat dan Daerah 2 Ketersediaan Infrastruktur sarana, prasarana dan air kurang ;	Ketersediaan input sarana produksi yang tidak tepat waktu;	Dukungan anggaran dan motivasi pemerintah pusat
		3 Keterbatasan SDM baik dalam hal kualitas maupun kuantitas; 4 Lemahnya kapasitas kelembagaan pelaku usaha dan pelaku utama ;	Belum terpadunya antar sector dalam menggerakkan sector perikanan;	Maupun daerah cukup tinggi

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Mengelola sumber daya Kelautan dan Perikanan	Masih terjadinya illegal fishing, unreported dan unregulated (IUU) fishing serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan	Kurangnya pengelolaan dari atas setelah adanya pelimpahan kewenangan	Pengembangan Ekowisata di daerah
3.	Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan	1.Masih rendahnya kualitas produk olahan perikanan dan packing terutama dari segi promosi; 2.Skala usaha yang masih skala rumah tangga dan belum dikelola secara maksimal; 3.Rendahnya nilai tukar nelayan dan pembudidaya	Belum lengkapnya sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil perikanan	Adanya kebutuhan/motivasi yang sama bagi petani untuk memupuk modal
4.	Memperluas akses pasar Domestik dan Internasional	1.Akses pasar produk kelautan dan perikanan belum maksimal menjangkau pasar domestik atau pun internasional 2.Belum stabilnya ketersediaan bahan baku	1.Persaingan produk perikanan dan produk-produklainnya, dimana produk perikanan cenderung lebih tinggi 2.Belum semua pasar ikan yang memenuhi standar pasar higienis	Adanya perlindungan harga dasar komoditi perikanan dengan regulasi peraturan pemerintah



### 3.4. Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat

#### a. Visi

Visi dan Misi Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023 adalah :

#### “Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”

Dalam visi yang diusung terdapat kata kunci “Gemilang” yang bermakna gerakan mencintai lingkungan, kesehatan, pendidikan cemerlang.

#### b. Misi

Tujuan, sasaran dan kebijakan umum RPJMD 2019-2023 Provinsi Nusa Tenggara Barat dijabarkan dalam 6 (Enam) misi, yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan terdapat pada misi 5, yaitu :

Misi 5 : NTB Sejahtera dan Mandiri melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi.

Tabel 13. Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Sasaran **Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB** beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB</b>			
1	Meningkatnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan bagi kemampuan Keuangan daerah;	(1) Masih terbatasnya sarana prasarana Unit Pelaksana Teknis Daerah	(1) Kurangnya biaya operasional	
2	Meningkatnya produksi Perikanan dan Kelautan;	(2) Masih terbatasnya sarana produksi budidaya perikanan.	(2) Belum adanya teknologi pengolahan pakan mandiri yang praktis dan efisien.	
3	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat perikanan dan kelautan;	(3) Terbatasnya penggunaan	(3) Masih	

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Meningkatnya angka konsumsi ikan masyarakat dan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan;	tekonologi budidaya.	lemahnya pendampingan terhadap pelaku usaha perikanan	
5	Terwujudnya pengawasan SDKP yang partisipatif;	(4) Masih rendahnya konsumsi ikan.	(4) .Regulasi kewenangan yang membatasi pengelolaan Sumberdaya Perikanan	
6	Peningkatan luasan kawasan konservasi perairan daerah;	(5) Semakin jauhnya daerah penangkapan ikan.		
7	Meningkatnya kualitas rekomendasi yang diberikan di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil	(6) Degradasi sumber daya kelautan dan perikanan (7) Lemahnya pengembangan sumber daya perikanan secara terpadu.		

### 3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam satu wilayah meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang fungsi budidaya. Sesuai dengan pola ruang kabupaten Lombok Timur yang ada dan berdasarkan potensi yang dimiliki masing-masing kecamatan, prospek pengembangan kelautan dan perikanan dapat dilaksanakan karena semua kecamatan di Kabupaten Lombok Timur minimal memiliki satu potensi perikanan (perairan laut, perairan umum dan budidaya).

Tabel 14. Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Perikanan	1. Infrastruktur perikanan di kawasan masih kurang 2. Belum adanya rencana detail pengembangan kawasan	Koordinasi antar sektor masih lemah	1. Dukungan pemerintah pusat baik kebijakan maupun anggaran cukup tinggi 2. Motivasi, budaya dan keterampilan masyarakat cukup tinggi.
2.	Budidaya Perikanan	1. Kelembagaan kelompok perikanan belum berfungsi optimal 2. Pendidikan pelaku usaha masih rendah sehingga lamban menerima inovasi baru. 3. Tingkat kemandirian masih kurang	1. SDM dan Etos kerja aparat pertanian masih rendah 2. Dukungan anggaran pemerintah daerah masih terbatas	1. Budaya masyarakat yang sangat mendukung 2. Potensi perikanan yang mendukung
3.	Pengembangan Pengelolaan Pasca Panen Produk Perikanan	1. Daya saing produk olahan perikanan masih rendah	1. Keterampilan pelaku usaha masih rendah 2. Dukungan peralatan produksi masih kurang	1. Telah ter-akomodir dalam RTRW 2. Sesuai dengan arah dan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.

### 3.6. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi dijelaskan sebagai berikut :

1. Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya
  - a. Rendahnya kualitas SDM, pemahaman, kesadaran, kepedulian dan partisipasi masyarakat
  - b. Rendahnya Pendapatan masyarakat pesisir
  - c. Rendahnya kualitas dan daya saing produk-produk perikanan
  - d. Rendahnya akses permodalan dan pemasaran produk-produk perikanan
  - e. Konflik dan tumpang tindih pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut

2. Degradasi Habitat dan Ekosistem Wilayah Pesisir
  - a. Pencemaran lingkungan wilayah pesisir dan laut
  - b. Ancaman Abrasi dan Sedimentasi
  - c. Mitigasi Bencana
3. Hukum dan Kelembagaan
  - a. Lemahnya Penataan dan Penegakan Hukum
  - b. Kurang tersedianya sistem informasi dan manajemen database pengelolaan kelautan dan perikanan
4. Sarana dan prasarana
  - a. Terbatasnya Sarana dan Prasarana penunjang Kelautan dan Perikanan.
  - b. Peralatan penangkapan ikan yang dimiliki masih sederhana
5. Penetapan Kabupaten Lombok Timur sebagai kawasan minapolitan perikanan tangkap
6. Belum termanfaatkannya secara maksimal potensi perikanan yang sangat besar, terutama untuk perikanan air tawar dan perikanan air laut.
7. Penetapan Kabupaten Lombok Timur sebagai kawasan minapolitan

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional.

Mengacu pada misi pembangunan Kabupaten Lombok Timur telah ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur seperti tabel dibawah ini.

Tabel T-C-25  
Tabel 15. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
			1	2	3	4	5
(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya</b>		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	-54,56	8,14	0,91	0,90	0,89
	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya (TON)	55.524,50	60.592	61.142	61.692	62.242

Tabel T-C 28

Tabel 16. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mencakup Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	INDIKATOR		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	REALISASI KINERJA	
			TAHUN (2018)	2019	2020
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
I.	ESELON II				
	1.	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	35.757,88 ton	55.525,25 ton	60.041,89 ton
II.	ESELON III				
	1.	Pelayanan administrasi perkantoran yang baik	100%	100%	100%
	2.	Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%
	3.	Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%
	4.	Pengelolaan Aset/Barang Daerah	100%	100%	100%
	5.	Kelompok Wanita Pesisir yang Berdaya Saing	100%	100%	100%
	6.	Pembenihan yang dihasilkan	100%	100%	100%
	7.	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang Dibina	100%	100%	100%
	8.	Kelompok Produksi Hasil Pengolahan Produk Perikanan	100%	100%	100%
	9.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	19.799,58 ton	35.891,47 ton	40.375,8 ton
	10.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	15.958,30 ton	19.633,78 ton	19.666,09 ton
III.	ESELON IV				
	1.	Jumlah Surat Terkirim	1200 surat	1200 surat	1282 surat
	2.	Tersedianya jasa listik, Telpon dan Air 1 tahun	3 unit	3 unit	3 keg.
	3.	Terpenuhinya Jasa Service dan Pajak Kendaraan Dinas	41 unit	41 unit	30 kend.
	4.	Laporan SPJ Selama 1 Tahun	100%	100%	100%
	5.	Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor	24 unit	24 unit	24 jenis
	6.	Tersedianya Alat Tulis Kantor	31 unit	31 unit	31 jenis
	7.	Terpenuhinya Bahan Cetak dan Penggandaan	7 jenis	7 jenis	8 jenis
	8.	Tercapainya Penerangan Gedung Kantor	5 jenis	5 jenis	9 jenis
	9.	Terlaksananya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 unit	5 unit	10 jenis

NO.	INDIKATOR		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	REALISASI KINERJA	
			TAHUN (2018)	2019	2020
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	10.	Meningkatkan Wawasan Pengetahuan	284 exp	284 exp	180 exp
	11.	Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman	471 kotak	471 kotak	830 ktk
	12.	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Keluar daerah	56 kali	56 kali	6 kali
	13.	Teridentifikasinya dan Terverifikasinya Kelompok Penerima Hibah Bansos	50 lembaga	50 lembaga	50 lembaga
	14.	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	-	-	1 unit
	15.	Perbaikan Gedung Kantor Dinas	1 paket	1 paket	1 unit
	16.	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	100%	38 kendaraan	30 kend.
	17.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	5 paket	5 jenis
	18.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Laporan	3 dok	3 dok	3 dok.
	19.	Tersedianya Buku Statistik Perikanan	6 buku	6 buku	11 buku
	20.	Terkelolanya Data Aset Dinas Perikanan	5 dok	5 dok	1 dok.
	21.	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pelatihan	2 kali	2 kali	2 kali
	22.	Terbinanya Kelompok Perikanan	1 kali	1 kali	20 klp
	23.	Terlaksananya Pelatihan Ragam Produk Pengolahan	4 kali	4 kali	-
	24.	Pelaksanaan Sosialisasi Budidaya Perikanan	2 kali	2 kali	2 kali
	25.	Termonitornya Bidang Budidaya Perikanan	11 kali	10 kali	20 klp
	26.	Berkembang dan Berkualitasnya Produksi Bibit Ikan	4 paket	7 paket	2 paket
	27.	Terlaksananya Kegiatan Budidaya Air Tawar	ekor		106100 ekor
	28.	Pelaksanaan Sosialisasi Perikanan tangkap	2 kali	2 kali	2 kali
	29.	Termonitornya Bidang Perikanan Tangkap	11 kali	11 kali	0
	30.	Terlaksananya Kegiatan Lomba masak serbaikan dan Lomba Produk Non Konsumsi Perikanan	1 kali	1 kali	

Tabel T-C 28

Tabel 17. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	INDIKATOR	TARGET KINERJA			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2021	2022	2023	
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(5)</b>
<b>I.</b>	<b>ESELON II</b>				
	1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	61.142 ton	61.692 ton	62.242 ton	62.242 ton
<b>II.</b>	<b>ESELON III</b>				
	1. Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan yang terawat dan berfungsi baik untuk mendukung pelaksanaan program	100%	100%	100%	100%
	2. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	16.350 ton	16.400 ton	16.450 ton	16.450 ton
	3. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	44.792 ton	45.292 ton	45.792 ton	45.792 ton
	4. Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	30%	30%	30%	30%
<b>III.</b>	<b>ESELON IV</b>				
	1. Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase Penata usahaan Keuangan Sesuai Rencana	100%	100%	100%	100%
	3. Persentase Pengelolaan Asset/Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%
	4. Persentase Terlaksananya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%
	5. Persentase Penyelesaian Pengadaan Asset Direncanakan	100%	100%	100%	100%
	6. Persentase Capaian Layanan Jasa Penunjang	100%	100%	100%	100%
	7. Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%



NO.	INDIKATOR		TARGET KINERJA			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2021	2022		
(1)	(2)		(3)	(4)	(1)	(2)
	8.	Teredianya data Sumberdaya Ikan	100%	100%	100%	100%
	9.	Persentase jumlah sarana dan prasarana penangkapan ikan	100%	100%	100%	100%
	10.	Terselenggaranya Pelayanan TPI	100%	100%	100%	100%
	11.	Terlaksananya kegiatan pembinaan	100%	100%	100%	100%
	12.	Tersalurnya Bantuan Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan Kepada Masyarakat	100%	100%	100%	100%
	13.	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi dan monitoring	100%	100%	100%	100%
	14.	Cakupan kelompok pengolah dan pemasar yang diberdayakan	100%	100%	100%	100%
	15.	Tersalurnya Bantuan Fasilitas Bagi Pengolah dan Pemasar	100%	100%	100%	100%

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mempercepat Implementasi dan konsistensi visi, misi, tujuan dan sasaran dalam proses pembangunan daerah, perlu dikembangkan strategi dan arah kebijakan sehingga dinamika pembangunan tetap terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Tabel 18. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur 2019– 2023

<b>Visi</b>	: " Lombok Timur yang Adil, Sejahtera dan Aman"
<b>Misi 3</b>	: Menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya.

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	ArahKebijakan
1	2	3	5	6
1	Meningkatkan Produksi Sektor Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya Produksi Kelautan dan Perikanan	1. Fasilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap	Penyediaan saran dan prasarana perikanan tangkap
			2. Fasilitasi sarana dan Prasarana perikanan budidaya	Penyediaan saran dan prasarana perikanan budidaya
			3. Pembinaan dan pemberdayaan kelompok nelayan dan pembudidaya ikan	Pembinaan kelompok melalui pelatihan - pelatihan dan sosialisasi
			4. Fasilitasi dan penguatan SDM kelompok usaha pengolah dan pemasar	Pemberdayaan ekonomi masyarakat

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN**

#### **6.1. Rencana Program dan Kegiatan**

Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dimaksud kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (Sumberdaya Manusia) , barang modal, termasuk peralatan dan teknologi , dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut , sebagai masukan (Input) untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam bentuk barang.jasa.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur menetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama 5 (Lima) tahun kedepan. Program dimaksud merupakan program prioritas RPJMD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Lombok Timur. Sebagai tindak lanjut upaya mewujudkan visi dan misi, maka strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan diimplementasi kedalam program dan kegiatan pembangunan.

Table 19. Program dan Rencana Kegiatan Tahun 2019-2020

No.	Program/Kegiatan
<b>A.</b>	<b>Program Rutin</b>
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
9.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
11.	Penyediaan Makanan dan Minuman
12.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
13.	Penyelenggaraan Evaluasi Administrasi Hibah dan Bansos
II.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>
14.	Pembangunan Gedung Kantor
15.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
16.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
17.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
III.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>
18.	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
19.	Pengelolaan Data Statistik Bidang Kelautan dan Perikanan
IV.	<b>PROGRAM MANAJEMEN PENGELOLAAN ASET/BARANG DAERAH</b>
20.	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Aset Barang Daerah (Simda BMD)
<b>B.</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>
V.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR</b>
21.	Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir
22.	Pembinaan dan Penguatan Kelompok Perikanan
23.	Pelatihan Ragam Produk Pengolahan Perikanan
VI.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN</b>
24.	Temu Lapangan Pelaku Usaha Perikanan Budidaya
25.	Monitoring dan Evaluasi Budidaya Perikanan
26.	Pembangunan/Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembenihan
27.	Pengembangan Budidaya Air Tawar
VII.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP</b>
28.	Temu Lapangan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap
29.	Monitoring dan Evaluasi Perikanan Tangkap
VIII.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>
30.	Gemar Makan Ikan
31.	Pengadaan Alat Pengolahan dan Pemasaran Perikanan
32.	Monitoring Keamanan Pangan
33.	Pelatihan Ragam Produk Pengolahan Perikanan
IX.	<b>PROGRAM PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN BUDIDAYA</b>
34.	Penyelenggaraan Balai Benih Ikan (BBI) Air Tawar
35.	Penyelenggaraan Balai Benih Ikan (BBI) Air Laut
36.	Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar

No.	Program/Kegiatan
37.	Pengembangan Kawasan Budidaya Rumput Laut
38.	Pengembangan Kawasan Budidaya Tambak
X.	<b>PROGRAM PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN SKALA KECIL UNTUK NELAYAN</b>
39.	Penyelenggaraan Tempat Pelelangan (TPI)
40.	Pengadaan Sarana dan Prsarana Penangkapan Ikan
41.	Pembinaan Pendampinga pada Kelompok Nelayan

Table 20. Program dan Rencana Kegiatan Tahun 2021-2023

No.	Program/Kegiatan
<b>A.</b>	<b>PROGRAM RUTIN/PENUNJANG</b>
<b>I.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1.1. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	2.1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
	2.2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	3.1. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
4.	Administrasi Umum Perangkat daerah
	4.1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	4.2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
	4.3. Penyediaan peralatan rumah tangga
	4.4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	4.5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	4.6. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5.1. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	6.1. Penyediaan jasa surat menyurat
	6.2. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
	6.3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7.1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
	7.2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
	7.3. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
<b>B.</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>
1.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	1.1. Penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan
2.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
	2.1. Pengembangan kapasitas nelayan kecil
3.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
	3.1. Pelayanan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

No.	Program/Kegiatan
<b>III.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>
1.	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
	1.1. Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil
	1.2. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil
2.	Pengelolaan Pembudidaya Ikan
	2.1. Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	2.2. Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
<b>IV.</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>
1.	Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	1.1. Pengawasan usaha perikanan tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	1.2. Pengawasan usaha perikanan bidang budidaya ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
<b>V.</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>
1.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
	1.1. Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil
2.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota
	2.1. Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota
	2.1. Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

## 6.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan program dan kegiatan yang telah diformulasikan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.

TABEL T.C.27  
TABEL 20. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( <i>out come</i> ), KEGIATAN ( <i>out come</i> , dan <i>Sub Kegiatan</i> ( <i>out put</i> ))	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2019		2020		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
						target (K)	(Rp.)	target (K)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kinerja Aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas dinas	Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas dinas	3.01.3.01.1.01	1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% pelayanan administrasi perkantoran yang baik	100%	100%	498,875,000	100%	469,203,797	1,017,681,562	Dinas Kelautan dan Perikanan
		3.01.3.01.1.01.01	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	1200 surat	200 sura	31,686,200	1282 surat	55,685,600	88,326,800	
		3.01.3.01.1.01.02	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya jasa listik, Telpon dan Air 1 tahun	3 unit	3 unit	18,600,000	3 keg.	24,346,863	55,300,000	
		3.01.3.01.1.01.06	3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Jasa Service dan Pajak Kendaraan Dinas	41 unit	41 unit	40,647,400	30 kend.	8,146,230	58,097,400	
		3.01.3.01.1.01.07	4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Laporan SPJ Selama 1 Tahun	100%	100%	112,026,800	100%	142,891,000	254,926,800	
		3.01.3.01.1.01.08	5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor	24 unit	24 unit	29,400,000	24 jenis	42,838,952	76,567,500	
		3.01.3.01.1.01.10	6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	31 unit	31 unit	20,079,600	31 jenis	18,591,852	38,671,662	
		3.01.3.01.1.01.11	7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Bahan Cetak dan Penggandaan	7 jenis	7 jenis	11,412,400	8 jenis	13,082,900	26,912,400	
		3.01.3.01.1.01.12	8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Tercapainya Penerangan Gedung Kantor	5 jenis	5 jenis	3,878,000	9 jenis	16,243,400	20,134,400	
		3.01.3.01.1.01.13	9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan	5 unit	5 unit	85,009,600	10 jenis	65,937,500	152,259,600	
		3.01.3.01.1.01.15	10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Meningkatkan Wawasan Pengetahuan	284 exp	284 exp	2,460,000	180 exp	760,000	5,460,000	
		3.01.3.01.1.01.17	11 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman	471 kotak	471 kotak	11,225,000	830 ktk	20,750,000	34,725,000	
		3.01.3.01.1.01.18	12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Keluar daerah	56 kali	56 kali	82,450,000	6 kali	34,929,500	131,300,000	
		3.01.3.01.1.01.27	13 Penyelenggaraan Evaluasi Administrasi Hibah dan Bansos	Teridentifikasi dan Terverifikasinya Kelompok Penerima Hibah Bansos	50 lembaga	50 lembaga	50,000,000	50 lembaga	25,000,000	75,000,000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, dan SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (out come), KEGIATAN (out come, dan Sub	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2019		2020		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						target (K)	(Rp.)	target (K)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	
Menyediakan Sarana dan Prasarana Kerja	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja	3.01.3.01.1.02	II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	332,035,974	100%	174,756,248	696,749,348	
		3.01.3.01.1.02	1. Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	-	-	-	1 unit	40,000,000	200,000,000	
		3.01.3.01.1.02.2	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Perbaikan Gedung Kantor Dinas	1 paket	1 paket	199,035,000	1 unit	9,930,000	209,035,000	
		3.01.3.01.1.02.2	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	100%	38 kendaraan	124,925,974	30 kend.	109,049,248	254,615,574	
		3.01.3.01.1.02.2	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	5 paket	8,075,000	5 jenis	15,777,000	33,098,774	
Meningkatkan kinerja ketaatan laporan dan keuangan	Meningkatnya kinerja ketaatan laporan dan keuangan	3.01.3.01.1.06	III. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	% pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	100%	100%	287,344,500	100%	259,952,700	554,525,750	
		3.01.3.01.1.06.0	1. Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Laporan	3 dok	3 dok	44,338,700	3 dok.	149,777,000	199,479,250	
		3.01.3.01.1.06.1	2. Pengelolaan Data Statistik Bidang Kelautan dan Perikanan	Tersedianya Buku Statistik Perikanan	6 buku	6 buku	243,005,800	11 buku	110,175,700	355,046,500	
Meningkatkan tata kelola aset daerah	Meningkatnya tata kelola aset daerah	3.01.3.01.1.06	IV. PROGRAM MANAJEMEN PENGELOLAAN ASET/BARANG DAERAH	% pengelolaan aset/pengelolaan barang daerah	100%	100%	42,744,000	100%	12,850,900	55,595,500	
			1. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Aset Barang Daerah (Simba BMD)	Terkelolanya Data Aset Dinas Perikanan	5 dok	5 dok	42,744,000	1 dok.	12,850,900	55,595,500	
Meningkatkan kapasitas SDM masyarakat pesisir	Meningkatnya kapasitas SDM masyarakat pesisir		V. PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR	% kelompok wanita pesisir yang berdaya saing	100%	100%	131,130,000	100%	37,008,655	82,208,655	
			1. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pelatihan	2 kali	2 kali	43,700,000	2 kali	18,581,400	18,581,400	
			2. Pembinaan dan Penguatan Kelompok Perikanan	Terbinanya Kelompok Perikanan	1 kali	1 kali	42,230,000	20 klp	18,427,255	18,427,255	
			3. Pelatihan Ragam Produk Pengolahan Perikanan	Terlaksananya Pelatihan Ragam Produk Pengolahan	4 kali	4 kali	45,200,000	-	-	45,200,000	
Meningkatkan kapasitas SDM pembudidaya ikan	Meningkatnya kapasitas SDM pembudidaya ikan		VI. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	% pembenihan yang dihasilkan	100%	100%	270,993,000	100%	267,281,350	267,403,650	
			1. Temu Lapang Pelaku Usaha Perikanan Budidaya	Pelaksanaan Sosialisasi Budidaya Perikanan	2 kali	2 kali	14,000,000	2 kali	25,109,350	25,109,350	



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, dan SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (out come), KEGIATAN (out come, dan Sub	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2019		2020			
						target (K)	(Rp.)	target (K)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			2. Monitoring dan Evaluasi Budidaya Perikanan	Termonitornya Bidang Budidaya Perikanan	11 kali	10 kali	6,014,000	0	-	-	
			3. Pembangunan/Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembenihan	Berkembang dan Berkualitasnya Produksi Bibit Ikan	4 paket	7 paket	250,979,000	2 paket	156,570,000	156,644,300	
			4. Pengembangan Budidaya Air Tawar	Terlaksananya Kegiatan Budidaya Air Tawar	ekor		-	106100 ekor	85,602,000	85,650,000	
Meningkatkan kapasitas SDM Nelayan	Meningkatnya kapasitas SDM Nelayan		VII PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	% pelaku usaha perikanan tangkap yang dibina	100%	100%	20,014,000	100%	25,109,350	31,123,350	
			1. Temu Lapang Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	Pelaksanaan Sosialisasi Perikanan Tangkap	2 kali	2 kali	14,000,000	2 kali	25,109,350	25,109,350	
			2. Monitoring dan Evaluasi Perikanan Tangkap	Termonitornya Bidang Perikanan Tangkap	11 kali	11 kali	6,014,000	0	-	6,014,000	
Meningkatkan konsumsi ikan masyarakat	Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat		VII PROGRAM I. PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	% Kelompok produksi hasil pengolahan produk perikanan	100%	100%	303,926,600	100%	41,250,000	295,117,000	
			1. Gemar Makan Ikan	Terlaksananya Kgiatan Lomba masak serba ikan dan Lomba Produk Non Konsumsi Perikanan	1 kali	1 kali	62,734,600	1 kali, 6 kl pembinaan	41,250,000	53,925,000	
			2. Pengadaan Alat Pengolahan dan Pemasaran Perikanan	Tersedianya Alat Pengolahan Sederhana Bagi Masyarakat	2 paket	2 paket	190,000,000	0	-	190,000,000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, dan SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (out come), KEGIATAN (out come, dan Sub	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
						2019		2020			
						target (K)	(Rp.)	target (K)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			3. Monitoring Keamanan Pangan Produk Perikanan	Terlaksananya Monitoring Keamanan Pangan	4 kali	11 kali	51,192,000	0	-	51,192,000	
			4. Pelatihan Ragam Produk Pengelolaan Perikanan	Terlaksananya kegiatan pelatihan ragam produk perikanan			-	2 kali	26,634,200	26,634,200	
Meningkatkan produktifitas perikanan budidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya		<b>IX. PROGRAM PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN BUDIDAYA</b>	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	25%	43.792 ton	<b>1,248,456,681</b>	<b>44.292 ton</b>	<b>1,309,613,435</b>	<b>1,313,746,150</b>	
			1. Penyelenggaraan Balai Benih Ikan (BBI) Air Tawar	Terlaksananya Kegiatan Operasional BBI Air Tawar	100%	100%	201,659,681	4 pkt	81,715,400	82,944,150	
			2. Penyelenggaraan Balai Benih Ikan (BBI) Air Laut	Terlaksananya Kegiatan Operasional BBI Air Laut	100%	100%	305,572,000	1 pkt	60,577,035	61,700,000	
			3. Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar	Tersedianya Paket Percontohan Budidaya	100%	1 paket	741,225,000	20 lokasi	1,167,321,000	1,169,102,000	
			4. Pengembangan Kawasan Budidaya Rumput Laut	Tersedianya Sarana Budidaya Rumput Laut				1 pkt	-	-	
			5. Pengembangan Kawasan Budidaya Tambak	Tersedianya Sarana Produksi Tambak Tradisional dan Rehabilitasi Saluran Tambak				20 lokasi	-	-	
Meningkatkan sarana dan prasarana untuk nelayan	Meningkatnya produksi perikanan tangkap		<b>X. PROGRAM PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN SKALA KECIL UNTUK NELAYAN</b>	<b>Meningkatnya produksi perikanan tangkap</b>	25%	16.250 ton	<b>2,634,824,200</b>	<b>16.300 ton</b>	<b>1,885,308,836</b>	<b>1,943,100,000</b>	
			1. Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terpenuhinya oprasional tempat pelelangan ikan	100%	100%	88,884,200	1 th	64,100,336	101,400,000	
			2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan	Terpenuhinya sarana dan prasarana penangkapan ikan	80%	10 paket	2,545,940,000	14 unit	1,821,208,500	1,841,700,000	
			3. Pembinaan Pendampingan pada Kelompok Nelayan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penangkapan dan Pemasaran Ikan, Meningkatnya Produksi Hasil Tangkap dan Kualitas Ikan yang didasarkan				0	-	-	
JUMLAH ANGGARAN .....								5,770,343,955	4,482,335,271	6,257,250,965	

TABEL T.C.27  
TABEL 21. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

TUJUAN (1)	SASARAN (2)	KODE (3)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (4)	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PROGRAM (out come) KEGIATAN (out put) (5)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (6)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (13)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB (14)		
						2021		2022		2023					
						target (K)	(Rp.)	target (K)	(Rp.)	target (K)	(Rp.)				
Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya				Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya		0,91		0,90		0,89		0,89			
	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya			Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya (TON)		61.142		61.692		62.242		62.242			
		3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	3,633,486,019	100%	3,778,825,000	100%	3,929,978,000	100%	Kelkan	
		3	25	01	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	80,495,900	100%	83,715,000	100%	87,063,000	100%		
		3	25	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	80,495,900	3 Laporan	83,715,000	3 Laporan	87,063,000	3 Laporan		
		3	25	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	3,004,007,719	100%	3,124,168,000	100%	3,249,117,500	100%	
		3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang/bulan	2,814,594,219	25 orang/bulan	2,927,178,000	25 orang/bulan	3,044,248,500	25 orang/bulan	
		3	25	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	189,413,500	3 dokumen	196,990,000	3 dokumen	204,869,000	3 dokumen	
		3	25	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah		100%	2,138,600	100%	2,230,000	100%	2,341,500	100%	
		3	25	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2,138,600	1 Laporan	2,230,000	1 Laporan	2,341,500	1 Laporan	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM (out come) KEGIATAN (out put)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
						2021		2022		2023							
						target (K)	(Rp.)	target (K)	(Rp.)	target (K)	(Rp.)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)				
		3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan pelayanan umum perangkat daerah		100%	138,170,600	100%	143,694,000	100%	149,439,000	100%	
		3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		5 Paket	2,810,000	8 Paket	2,922,000	8 Paket	3,038,000	8 Paket	
		3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		31 Paket	16,449,000	35 Paket	17,106,000	35 Paket	17,790,000	35 Paket	
		3	25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		16 Paket	2,318,600	25 Paket	2,411,000	25 Paket	2,507,000	25 Paket	
		3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		4 Paket	6,053,000	7 Paket	6,295,000	7 Paket	6,546,000	7 Paket	
		3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		3 dokumen	1,496,000	3 dokumen	1,555,000	3 dokumen	1,617,000	3 dokumen	
		3	25	01	2.06	09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		56 laporan	109,044,000	75 laporan	113,405,000	75 laporan	117,941,000	75 laporan	
		3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyelesaian Pengadaan Asset Direncanakan		100%	48,131,000	100%	50,056,000	100%	52,058,000	100%	
		3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		4 unit	48,131,000	5 unit	50,056,000	5 unit	52,058,000	5 unit	
		3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan		100%	176,657,200	100%	183,723,000	100%	191,071,000	100%	
		3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	61,347,200	1 Laporan	63,801,000	1 Laporan	66,353,000	1 Laporan	
		3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	41,700,000	1 Laporan	43,368,000	1 Laporan	45,102,000	1 Laporan	
		3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	73,610,000	1 Laporan	76,554,000	1 Laporan	79,616,000	1 Laporan	
		3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100%	183,885,000	100%	191,239,000	100%	198,888,000	100%	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN PROGRAM (out come) KEGIATAN (out put)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
						2021		2022		2023							
						target (K)	(Rp.)	target (K)	(Rp.)	target (K)	(Rp.)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)				
		3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		41 unit	165,845,000	38 unit	172,478,000	38 unit	179,377,000	38 unit	
		3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		8 unit	8,040,000	8 unit	8,361,000	8 unit	8,695,000	8 unit	
		3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	10,000,000	2 unit	10,400,000	2 unit	10,816,000	2 unit	
		3	25	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap</b>		16.350 ton	1,682,368,700	16.400 ton	1,749,663,000	16.450 ton	1,819,649,000	16.450 ton	
		3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai,Danau,Waduk,Rawa dan Genangan Air Lainnya yang	Persentase tersedianya data sumber daya ikan		100%	63,664,700	100%	66,211,000	100%	68,860,000	100%	
		3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia		1 Dokumen	63,664,700	1 Dokumen	66,211,000	1 Dokumen	68,860,000	1 Dokumen	
		3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyaluran bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan kepada nelayan		100%	1,559,000,000	100%	1,621,360,000	100%	1,686,214,000	100%	
		3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya		250 orang	1,559,000,000	400 orang	1,621,360,000	450 orang	1,686,214,000	450 orang	
		3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Pelaksanaan pelayanan TPI		100%	59,704,000	100%	62,092,000	100%	64,575,000	100%	
		3	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		3 layanan	59,704,000	3 layanan	62,092,000	3 layanan	64,575,000	3 layanan	
		3	25	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>		44.792 ton	1,763,979,470	45.292 ton	1,684,538,000	45.792 ton	1,751,920,000	45.792 ton	
		3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Persentase jumlah kelompok yang di bina		-	0	100%	25,000,000	100%	26,000,000	100%	
		3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas		0	100 Kelompok	25,000,000	100 Kelompok	26,000,000	100 Kelompok		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PROGRAM (out come) KEGIATAN (out put)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
						2021		2022		2023								
						target (K)	(Rp.)	target (K)	(Rp.)	target (K)	(Rp.)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)					
		3	25	04	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan			0		0	-	-	-		
		3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Persentase penyaluran bantuan sarana dan prasarana pembudidaya ikan kepada masyarakat			100%	1,763,979,470	100%	1,659,538,000	100%	1,725,920,000	100%	
		3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			30 unit	1,618,711,000	38 unit	1,202,678,000	40 unit	1,250,786,000	40 unit	
		3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			4 unit	145,268,470	5 unit	456,860,000	5 unit	475,134,000	5 unit	
		3	25	05			<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	Persentase Pengurangan Tingkat Penggunaan Bahan Berbahaya			15%	0	15%	150,000,000	15%	156,000,000	15%	
		3	25	05	2.01		Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai,Danau,Waduk,Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan			-	-	100%	150,000,000	100%	156,000,000	100%	
		3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai,Danau,Waduk,Ra wa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota			-	0	1 Dokumen	75,000,000	1 Dokumen	78,000,000	1 Dokumen	
		3	25	05	2.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Budidaya Ikan di Wilayah Sungai,Danau,Waduk,Ra wa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota			-	0	1 Dokumen	75,000,000	1 Dokumen	78,000,000	1 Dokumen	
		3	25	06			<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan			30%	547,546,899	30%	569,448,000	30%	592,226,000	30%	
		3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase jumlah kelompok pengolah dan pemasar (Poklahsar) yang di bina			100%	27,548,899	100%	78,650,000	100%	81,796,000	100%	
		3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko			80 unit usaha	27,548,899	100 unit usaha	78,650,000	100 unit usaha	81,796,000	100 unit usaha	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PROGRAM (out come) KEGIATAN (out put)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2021		2022		2023			
						target (K)	(Rp.)	target (K)	(Rp.)	target (K)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		3 25 06 2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyaluran bantuan sarana dan prasarana Pengolahan ikan kepada masyarakat		100%	519,998,000	100%	490,798,000	100%	510,430,000	100%	
		3 25 06 2.03 01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
			Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dala 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi		2 Pelaku Usaha	519,998,000	3 Pelaku Usaha	490,798,000	4 Pelaku Usaha	510,430,000	4 Pelaku usaha	
JUMLAH ANGGARAN .....							7,627,381,088		7,932,474,000		8,249,773,000		













**BAB VII**  
**INDIKATOR KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi juga cascading berdasarkan RPJMD. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur menetapkan 1 (Satu) Indikator Kinerja dari program prioritas yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (Lima) tahun, berikut indikator Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur yang mengacu pada tujuan dan untuk Rencana Strategis Periode 2019-2013 sebagai berikut :

Tabel 23. Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Lombok Timur mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Capaian Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	ton	35.757	60.042	60.592	61.142	61.692	62.242	62.242

## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 -2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah SKPD, memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJMD. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Diharapkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan dapat menjadi komitmen dalam membawa arah dan peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Tahun 2019 -2023 tidak bersifat kaku dan senantiasa terus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam rencana ulang perumusan Renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan setiap tahunnya. Dalam penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan akan menjadi acuan/pedoman dalam penentuan-penentuan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan yang dituangkan dalam Rencana Kerjadan Anggaran (RKA-Dinas Kelautan dan Perikanan).

Semoga rencana strategis ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selong, Desember 2021

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

M. ZAINUDDIN, S.P., M.Si  
NIP. 197807012009011005  
Pembina (IV/a)